



Buletin

Parlementaria

Nomor 995/III/II/2018 • Februari 2018

DPR dan KPK Resmikan Klinik e-LHKPN



KLINIK
e-LHKPN
PUSAT PELAYANAN
PENGADUAN MA
PENYALURAN DE
MASYARAKAT
INFORMASI PUBL
Telp: (021) 571534



9 772614 339005

DPR Butuh Kritik

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

DPR dan KPK Resmikan Klinik e-LHKPN



Pimpinan DPR di dampingi Ketua KPK saat melakukan simulasi pelaporan e-LHKPN di Gedung DPR

Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan Klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). Melalui sistem daring (online), diharapkan program tersebut dapat mempermudah Anggota DPR dalam memperbaharui LHKPN.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pembukaan klinik e-LHKPN merupakan langkah DPR untuk lebih terbuka dan transparan kepada publik dalam rangka menuju parlemen modern. Selain itu, klinik ini juga menjadi bukti adanya sinergi antara DPR dengan KPK.

“Peresmian klinik e-LHKPN ini adalah bagian dari komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi sekaligus bukti adanya sinergi antara DPR dan KPK. Jadi keliru kalau ada upaya-upaya adu domba DPR dan KPK,” papar Bamsuet, sapaan akrabnya.

Menurut politisi F-PG itu, pembukaan e-LHKPN ini akan mempermudah para anggota DPR yang dulunya harus mengisi formulir dan mengirimnya kepada KPK. Karena itulah, ia menginisiatif dibukanya klinik e-LHKPN yang diluncurkan KPK

di Komplek Parlemen. Bamsuet menilai sistem ini akan lebih efektif.

“Tujuannya untuk mempermudah para Anggota DPR yang pada awal jabatan sudah melaporkan harta kekayaan pada KPK, kemudian pada perjalanannya selama 5 tahun ada perubahan-perubahan.

Peresmian klinik e-LHKPN ini adalah bagian dari komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi sekaligus bukti adanya sinergi antara DPR dan KPK.

Nah, cukup dengan mengakses online dan mengisi secara online. Tidak perlu lagi secara manual mengisi formulir dan kirim pada KPK,” imbuh politisi asal dapil Jateng itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Klinik e-LHKPN merupakan bentuk dari komitmen DPR untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat negara.

“Memberantas korupsi merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk bagi eksekutif dan legislatif. Hal ini juga memberikan kesadaran bahwa melaporkan kekayaan merupakan salah satu tindak pencegahan korupsi di lingkungan legislatif,” imbuh politisi F-Gerindra itu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan klinik e-LHKPN sebagai bentuk perbaikan terhadap sistem dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Agus, DPR sudah banyak melakukan terobosan menuju transparansi.

“LHKPN untuk DPR sudah sangat baik, karena yang mengisi sudah 96 persen hanya 20 orang belum mengisi. Yang masih rendah justru DPRD di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten,” ungkap Agus.

Pt. Sekjen DPR RI Damayanti menjelaskan, Kesetjengan DPR sebagai *supporting system*, memfasilitasi segala sesuatu yang dapat memudahkan Anggota DPR RI melalui Klinik e-LHKPN tersebut. Di sisi lain, hal ini sebagai wujud sinergitas bahwa DPR RI turut mendukung program-program KPK.

Maya, panggilan akrab Damayanti menjelaskan, nantinya akan ada Pegawai Kesetjengan DPR maupun KPK secara bergantian berjaga di Klinik e-LHKPN, demi memudahkan siapapun yang butuh bantuan untuk mengisi e-LHKPN tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Pimpinan DPR diantaranya Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, dan beberapa Anggota DPR lainnya, serta pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. ■ *(tim parle)*

Serang Pemuka Agama Sama Saja Menyerang Jantung Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa penyerangan terhadap rumah ibadah dan simbol-simbolnya, baik pastur, pendeta, ustadz, ulama maupun kyai, sama saja serangan kepada jantung bangsa Indonesia. Seperti kejadian diserangnya ulama di Jawa Barat, atau pastur di DI Yogyakarta baru-baru ini.

“Kita menyesalkan terjadinya insiden tersebut. Dan, yang mengacau rumah ibadah dan simbol-simbol agama adalah musuh bangsa, siapa pun dia. Apalagi, provokasi ini rutin dan kita tidak boleh terpengaruh atau menjadi tidak percaya diri bahwa kita bangsa cinta damai,” tegas Fahri saat dihubungi Parlemen, Senin (12/2).

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu meminta kepada negara untuk secepatnya bertindak, tanpa membedakan golongan. “Negara harus hadir dan bertindak atas penyerangan tersebut,” ujarnya.

Menurut Fahri, rumah ibadah haruslah dijaga. Bahkan, ia menyamakan rumah ibadah dengan hati, yang harus dijaga karena bila terluka maka akan membuat dunia bergoncang.

“Setiap kita mendengar ada rumah Ibadah yang diserang, dada kita selalu terus berdegup kencang. Entahlah, mungkin karena kita tahu bahwa yang diserang adalah rumah kita sendiri, tak peduli apapun agama dan keyakinan,” imbuhnya.

Sebagaimana hati, masih kata Fahri, rumah ibadah adalah juga tempat iman yang harus dijaga, ditanam, disemai dan dipelihara hingga berbuah menjadi lentera dalam hidup. “Rumah ibadah adalah tempat bersinarnya kebaikan dan tempat kita saling menjaga batas pribadi, bahwa ada yang tak dapat di-lintas batas,” ungkapnya.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu pun mengingatkan bahwa rumah ibadah tidak boleh disentuh senjata meskipun perang. “Dalam perang pun, rumah ibadah adalah tempat yang tak boleh disentuh senjata. Orang yang memasukinya adalah yang tidak ingin lagi berperang dan bersedia memasuki jalur perdamaian maka ia juga tak boleh disentuh,” tutup Fahri.

Diketahui, terjadi peristiwa penyerangan dan aksi kekerasan yang sebelumnya menasar KH Umar Basri, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengasuh Pesantren Al-Hidayah di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada 27 Januari 2018.

Kemudian hal serupa kembali menasar HR. Prawoto, Komandan Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) di Blok Sawah, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung pada 1 Februari 2018.

Selanjutnya, baru saja pada Ahad (11/02) terjadi lagi kekerasan di Gereja St. Lidwina Bedog, Kab Sleman, Yogyakarta. Romo Edmund Prier SJ beserta jemaahnya diserang saat melakukan misa. ■ (ef)



Wakil Ketua DPR Korkesra, Fahri Hamzah

Foto: Antri/Br

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si(Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,
Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI
Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,
Damar Maulana Taher
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom, Erman Suhendri, S.Sos.I,
Mustaqim, S.Kom.I
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Calon Gubernur BI Harus Profesional Bidang Moneter dan Fiskal

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo akan memasuki masa pensiun atau purna tugas pada Mei 2018 mendatang. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Taufik Kurniawan mengungkapkan kriteria calon yang mumpuni untuk mengemban amanah sebagai Gubernur BI yang baru nantinya.

Ia mengatakan, calon Gubernur BI ke depan harus mampu menjaga fluktuasi dan stabilitas nilai rupiah. Disamping itu juga harus mempunyai pengalaman di bidang moneter dan fiskal. “Jangan hanya tahunya di moneter saja. Kalau Pak Agus ini kan dulunya mantan Menteri Keuangan, mantan Dirut Bank Mandiri dan sekarang Gubernur BI. Jadi lengkap, tidak hanya kacamata kuda tapi dia juga punya akses dalam kaitan

kebijakan fiskal dan pernah sebagai pelaku juga,” ujar Taufik, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/2).

Ia mengharapkan, Gubernur BI selanjutnya mampu menjaga keseimbangan moneter, laju inflasi dan cadangan devisa jangan sampai dibawah 100 miliar dolar AS. “Kalau dibawah 100 miliar dolar AS pasti akan terjadi kegoncangan ekonomi dan negara dalam kondisi yang krisis.



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan

Foto: Kamil Jk

Tiga hal itu hanya dimiliki oleh calon Gubernur BI yang mampu dan menguasai secara profesional di bidang moneter dan fiskal. Kalau hanya moneter saja atau fiskal saja, ini kurang lengkap,” pungkas politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu. ■ (mbr/se)

DPR Butuh Kritik

Suasana Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018 yang dipimpin langsung ketuanya Bambang Soesatyo, Rabu (14/2) berbeda dengan biasanya. Selain pidato penutupan sidang, agenda lainnya adalah Laporan Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa yang melaporkan hasil kerja dan penyampaian rekomendasi.



Suasana Rapat Paripurna DPR

Yang membuat suasana agak lain lantaran Ketua DPR yang mengenakan baju hitam menandakan keprihatinan karena banyaknya kritik kepada wakil-wakil rakyat setelah mengesahkan revisi UU

MD3. Derasnya kecaman ke DPR dengan disahkannya revisi UU MD3 tersebut diantaranya, DPR dituduh anti kritik, dan menghambat demokrasi. Seperti tanggapan Pukat UGM, UU MD3 ini menjadikan DPR Anti Kritik, dan hal itu

mengancam demokrasi serta mengurangi kontrol masyarakat kepada DPR.

“Saya mengenakan pakaian hitam-hitam ini bukan tanpa maksud. Saya menanggapi dengan jiwa besar bahwa DPR butuh kritik,” tandas Bamsuet. Bahkan kalimat “Kami Butuh Kritik” terpampang di layar Sidang Paripurna”.

Dalam bagian pidatonya Ketua DPR menegaskan, dengan semangat untuk terus berbenah, DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Di era keterbukaan sekarang ini, kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun.

“Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi, karena sejatinya demokrasi adalah bagaimana mengkonversi berbagai perbedaan pandangan menjadi sebuah keputusan,” ujar Bamsuet.

Begitu besarnya perhatian atas kritik masyarakat ini, Ketua DPR mengisyaratkan akan diadakannya lomba kritik dengan mengundang para pihak termasuk pakar menilai kritik-kritik yang disampaikan. “Kalau perlu diadakan lomba kritik dan pemenangnya diberi hadiah menarik,” tantang Ketua DPR. ■ (mp/ria/se)

Kasus Penyiksaan TKI Tak Boleh Terulang

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, kasus pelecehan dan penyiksaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak boleh terulang kembali dan meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian ini. Hal ini terkait meninggalnya TKI asal Medan, Adelina, akibat penyiksaan dan pelecehan di Malaysia, 11 Februari 2018 lalu.



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon

Foto: Kamil/br

“Kita berharap kasus ini diusut sampai tuntas oleh aparat penegak hukum setempat. Tentu saja KBRI kita di Malaysia harus proaktif dalam menangani masalah ini, sehingga ada kejelasan dan jangan sampai terulang lagi,” tegas Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Politisi F-Gerindra itu menegaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara apalagi yang berada di negara lain. “Tugas negara itu, salah satunya melindungi segenap tumpah darah warga negara, apalagi untuk mereka yang sedang berjuang di negeri lain,” pungkasnya.

Fadli pun menyampaikan rasa belasungkawa atas wafatnya Adelina. “Kami tentu sangat berduka dan belasungkawa atas wafatnya almarhumah Adelina karena terjadi penyiksaan dan pelecehan di Malaysia. Kepada keluarga yang ditinggalkan untuk senantiasa sabar dan tabah,” ujar Fadli. ■ (mbr/)

DPR Wajib Jaga KPK

Ketua Panitia Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melaporkan hasil kinerja pengawasan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dia menyampaikan panitia angket ini dibentuk karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang mengarah kepada dugaan pelanggaran KPK terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Agun menerangkan, KPK merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan angket, karena tugas dan kewenangan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang KPK.



Pimpinan DPR menerima laporan hasil kinerja pengawasan Pansus KPK

“Ini (pengawasan) dilakukan dengan pertimbangan bahwa DPR berkewajiban untuk menjaga KPK yang tidak saja kuat dalam melaksanakan tupoksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga KPK yang benar cermat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas Agun di hadapan Sidang Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Selanjutnya ia menyatakan, Panitia Angket KPK berharap lembaga antirasuah ini bisa

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola kelembagaan. Selain itu KPK juga dituntut mampu menciptakan tata kelola SDM dan tata kelola anggaran yang baik.

Agun juga menyampaikan, Panitia Angket KPK telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan pedoman penyelidikan dan agenda kerja yang transparan dan terukur. Sehingga masyarakat dapat melihat bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK, namun dibentuk untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selama ini.

“Dilandasi niatan tekad anggota DPR untuk menjadikan KPK transparan dan fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 45,” ujar Agun.

Dia juga menyampaikan, Panitia Angket DPR RI adalah fungsi pengawasan yang tinggi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan hak angket dapat membuat terang dan jelas permasalahan mengenai penyelidikan atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dalam penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan problem di kemudian hari.

■ (eka/sc)



PIA DPR menyelenggarakan gerakan tanam 1000 pohon di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Gerakan Tanam 1000 Pohon PIA DPR Wujud Kesadaran Lingkungan

Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Lenny Bambang Soesatyo mengatakan, gerakan penanaman 1000 pohon oleh PIA DPR RI dalam rangka penghijauan, merupakan suatu bentuk wujud kesadaran dan kepedulian PIA DPR RI terhadap pelestarian lingkungan. Khususnya dalam mendukung gerakan penghijauan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Desember 2017 lalu.

“Gerakan menanam 1000 pohon oleh PIA DPR RI ini juga merupakan salah satu bentuk kesadaran Anggota PIA DPR RI yang tergabung. Dan juga dengan harapan masyarakat Indonesia bisa terinspirasi dan mengikuti gerakan seperti yang kita lakukan hari ini agar ke depan masyarakat Indonesia bisa terbebas dari polusi dan bahaya banjir serta tanah longsor,” kata Lenny dalam pidato sambutannya di acara Gerakan Penanaman 1000 pohon oleh PIA DPR RI di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Lenny mengungkapkan, kegiatan penanaman 1000 pohon yang dilakukan oleh PIA merupakan suatu bentuk tahapan awal dalam rangka penghijauan. “Tentunya setelah ini selanjutnya kami akan mengendakan untuk perawatan dan penghijauan, sehingga pohon-pohon yang kami tanam pada hari ini tetap hijau dan terawat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon menilai pelaksanaan kegiatan penanaman 1000 pohon oleh PIA DPR RI merupakan satu bentuk kegiatan



Foto: Kresno/br

dengan harapan untuk memberikan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat, khususnya dalam menanam pohon.

“Tema lingkungan dipilih PIA DPR RI untuk mengawali kegiatan di tahun 2018. Seperti kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan tergolong cukup rendah,” ungkapnya.

Grace menjelaskan pohon yang ditanam merupakan tanaman pohon yang keberadaannya cukup langka yang ada di Indonesia. “Karena keterbatasan waktu, tempat dan dana, memang saat ini hanya 10-12 macam tanaman pohon saja yang dapat kami tanam hari ini. Tapi Insyaallah ini akan berlanjut di beberapa tempat setelah ini dan tentunya akan kita perbanyak jenis dari tanamannya,” harap Grace.

Sementara Ketua Panitia Lisa Robert Kardinal dalam sambutannya melaporkan tanaman pohon yang ditanam merupakan jenis buah-buahan dan dalam penyediaannya bekerja sama dengan Dinas Pertanian.

“Adapun tanaman yang disiapkan antara lain ada duren montong, jambu jamaika, sawo putih, rambutan, matoa, alpukat, jambang, jeruk, pamel, nangka mini, jambu kristal, kedondong, zaitun, tin hijau, dan kelengkeng,” tutur Lisa.

Mengenai lokasi tempat diadakannya penanaman pohon, Lisa memandang hal tersebut merupakan kesepakatan bersama antar anggota PIA DPR RI yang selanjutnya juga diagendakan penanaman di beberapa tempat lain. “Penanaman pohon ini nantinya juga akan diselenggarakan di lingkungan Komplek Rumah Jabatan Kalibata dan Ulujami, juga di Wisma Griya Sabha Kopo, Jawa Barat,” imbuhnya. ■ (tra/sc)

Komisi IV Pertanyakan SK Menhut Usulan Perubahan Peruntukan Alih Fungsi Hutan

Komisi IV DPR RI mempertanyakan adanya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang berbeda, terkait usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sumatera Selatan yang masuk dalam kriteria berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS).

“Pertama, Keputusan Menteri yang menerangkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan marga satwa, dan satu lagi keputusan menteri yang mengatakan bahwa kawasan tersebut masuk dalam APL (area penggunaan lain). Ini jelas berbeda. Kami ingin perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan ini bermanfaat untuk masyarakat, walaupun tidak memungkirkan ada perusahaan di dalamnya, jika memang sesuai aturan ya tidak masalah,” papar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin RDP (rapat dengar pendapat) Komisi IV DPR dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/2).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Fauzi Amro, misalnya yang mengatakan bahwa dua surat keputusan Menteri Kehutanan yang berbeda itu juga menyangkut luas lahan yang masuk dalam usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sumatera Selatan yang masuk dalam kriteria berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS).

“Ada dua SK Menhut yakni SK Menhut No. 245 tahun 1991, dan SK Menhut No. 755 Tahun 1990. Dimana yang satu mengatakan 31 ribu hektar yang menjadi usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan dalam RTRWP Sumatera Selatan yang masuk DPCLS dan SK satunya lagi tercantum



Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo

Foto: Jekel/br

71 ribu hektar. Selisih angka yang tidak sedikit, yakni lebih dari setengahnya. Di sini, kami meminta kepada Kemenhut dan LK untuk menelusuri hal itu, agar jangan sampai ada tumpang tindih aturan jika kelak APL diberikan ke masyarakat,” ujar Fauzi.

Tidak hanya itu, politisi dari Fraksi Partai Hanura ini juga meminta Tim Penegakkan Hukum Kemen LHK untuk menelusuri informasi yang mengatakan adanya tiga perusahaan yang menyerobot masuk area kehutanan, dan yang masuk ke lahan hutan. Sehingga, jika pun kelak lahan tersebut jadi diberikan ke masyarakat harus ada aturan hukumnya yang jelas.

Oleh karena itulah, Komisi IV meminta kronologis dan penjelasan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengingat kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan saja, namun juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia. ■ (ayni/sc)



Tim Panja Migas Komisi VII DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron meninjau Kantor PGN.

DPR Upayakan Jaringan Gas untuk Rakyat

Ketua Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI Herman Khaeron beserta rombongan, meninjau Kantor Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta. Dalam kunjungannya, Panja Migas mendorong lahirnya aturan yang memberikan dukungan, agar rakyat memiliki akses untuk mendapatkan jaringan gas yang bisa masuk sampai dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Komisi VII, jaringan gas yang masuk ke rumah tangga lebih efisien daripada gas elpiji yang selama ini beredar di masyarakat.

“Yaitu dalam bentuk jaringan gas kepada masyarakat. Ini harus betul-betul diberikan *legacy*, kebijakan yang memang mendorong supaya BUMN ini untung, juga BUMN ini berkontribusi secara luas kepada masyarakat,” papar Herman setelah berdialog dengan jajaran Pimpinan PGN dan peninjauan Kantor PGN di Jakarta, Selasa (13/2).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, PGN sebagai pengelola sumber gas nasional harus diberikan diskresi dan kekhususan oleh pemerintah. “Bahwa PGN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk melakukan

konversi dan pelayanan kepada masyarakat, baik yang komersial maupun yang afirmasi,” ungkapnya.

Setelah melihat kapasitas PGN, Herman meyakini, perusahaan ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk bisa memenuhi harapan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, utamanya yang berbasis gas. Tidak hanya gas untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk kebutuhan transportasi.

“Kita sudah melihat konversi dari fuel ke gas untuk taksi, kemudian untuk bajaj. Dan juga saya sudah melihat

komunikasi dengan publik lewat control room, semuanya berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Herman menilai, PGN memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun dan menjadi institusi yang ditugasi oleh negara untuk melakukan konversi dari minyak ke gas. Namun PGN membutuhkan infrastruktur pendukung guna mencukupi kebutuhan gas nasional. Dia menyampaikan, penggunaan gas dari sisi ekonomi lebih menguntungkan dibanding penggunaan minyak.

“Infrastruktur yang terbangun mestinya diberi kepercayaan yang lebih luas. Dengan konversi ini juga menjadi efisien. Udara juga menjadi clean. Emisi yang dikeluarkan gas itu jauh lebih rendah dibandingkan emisi yang dikeluarkan oleh *fuel*,” papar politisi asal dapil Jabar itu.

Herman juga menegaskan, Indonesia di masa depan harus berdaulat dan mandiri di bidang energi. “Dan tentu dengan visi jangka panjang, kita harus berdaulat dan mandiri di bidang energi, ini juga harus dipastikan. Dan kita juga harus tahu bagaimana infrastruktur yang ada,” imbuhnya. ■(eko/sf)

Penataan Kebencanaan Daerah Masih Lemah

Anggota Komisi VIII DPR RI Supriyanto menilai, masalah penataan kebencanaan di Indonesia masih lemah, terlebih lagi di daerah-daerah rawan bencana. Oleh karena itu, semestinya Pemerintah Pusat maupun Daerah harus membuat suatu strategi anggaran untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR meninjau tanggul penahan banjir Oesapah di Kupang, NTT.

Menurut politisi F-Gerindra itu, dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di daerah selama ini terlalu kecil, karena Pemerintah Daerah selalu bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat setiap kali ada bencana. Sedangkan datangnya bencana alam tidak bisa diprediksi.

“Pemerintah daerah terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan kurang memikirkan antisipasi terhadap terjadinya bencana,” tegas Supriyanto dalam kunjungannya ke tanggul penahan banjir Oesapah, Kupang, Provinsi NTT, Kamis (8/2).

Senada dengan Supriyanto, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly mengatakan kurangnya anggaran untuk pembangunan tanggul penahan banjir di Oesapah dapat mengganggu percepatan pembangunan penataan bencana.

“Tanggul ini kan sifatnya untuk menghindari bencana yang sering terjadi disini, karena tanah rakyat sering terkikis oleh banjir yang melewati sungai ini. Masalahnya, dari dana Rp 8,5 miliar yang diajukan baru turun Rp 5,3 miliar. Harusnya ini didahulukan karena sedang musim hujan,” imbuh Bisri. ■ (enoi/sf)

Kecelakaan Akibat Kelalaian Wajib Diproses Hukum

Bus yang mengangkut sekitar 59 anggota Koperasi Simpan Pinjam Permata Ciputat, Tangerang Selatan mengalami tragedi kecelakaan maut di Tanjakan Emen di Lembang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pekan lalu.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Moh. Nizar Zahro menyatakan keprihatinannya dan mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas kecelakaan maut yang menelan 29 korban jiwa tersebut. “Atas nama pribadi dan Komisi V, saya mengucapkan prihatin atas musibah yang menyebabkan 29 orang menjadi korban,” ujarnya saat ditemui sebelum menghadiri Rapat Paripurna ke-17 DPR RI di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (12/2).



Anggota Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahro

Politisi F-Gerindra ini mengungkapkan pada prinsipnya musibah seperti ini berkali-kali terjadi atas kecerobahan perusahaan umum bus. “Kecelakaan ini disinyalir dan dari dugaan Kepolisian karena rem blong. Bahkan remnya itu tidak utuh seperti biasanya” ujarnya.

Ita melanjutkan, sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Aturan Jalan, maka perusahaan umum ini wajib untuk direkomendasikan untuk dihentikan.

“Ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan umum bus yang telah uji KIR, dan kepada Pemda setempat tidak boleh sembarangan meluluskan bus yang tidak layak operasi. Oleh karena itu, kecelakaan akibat kelalaian dan pelanggaran ini wajib diproses sesuai hukum,” tegas pria dari daerah pemilihan Jawa Timur XI ini. ■ (nibr/sc)

DPR Tidak Lagi Bahas Anggaran Sampai Satuan Tiga

Anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, DPR RI sudah tidak berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga. Hal tersebut menyusul paparan dari Pimpinan KPK dalam RDP dengan Komisi III sebelumnya, yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran.



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK

“Saya hanya ingin menggarisbawahi dalam paparan Pimpinan KPK yang meminta DPR lebih transparan dalam pembahasan anggaran. Perlu kami

jelaskan di sini, bahwa sejak putusan MK yang berkenaan dengan pembahasan satuan tiga, DPR sudah tidak berwenang lagi membahas sampai satuan tiga. Jadi

sejak putusan itu, pembahasan anggaran DPR hanya bersifat makro, sedangkan mikronya ada di pemerintah,” jelas Azis saat RDP dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Ditambahkannya, sementara dalam rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pihaknya sebagai Ketua Banggar selalu melakukan rapat secara terbuka dan hasilnya dapat diakses melalui website DPR. Adapun sebelum putusan MK itu, pembahasan anggaran satuan tiga memang dibahas di Komisi, bukan di Banggar. Namun hal itu kini tidak bisa dilakukan Komisi DPR lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi. Ia mengatakan bahwa satuan tiga sudah tidak lagi harus melalui persetujuan Komisi. Artinya tidak ada lagi kewajiban Kementerian atau Lembaga untuk meminta persetujuan Komisi di DPR, melainkan hanya bersifat program.

Namun konsekuensinya dalam UU MD3, karena DPR tidak lagi membahas atau menyetujui anggaran, maka satu bulan setelah pengesahan APBN di paripurna, Kementerian atau Lembaga harus menyampaikan ke Komisi dan harus bisa diakses oleh masyarakat.

“Itu sebagai bentuk pengawasan kita terhadap mitra. Tapi kenyataannya, Kementerian atau Lembaga tidak bisa memenuhi itu. Oleh karena itu, kami meminta KPK untuk ikut mengingatkan Kementerian atau Lembaga untuk tertib membuat laporan itu,” imbuh Mulyadi. ■

(ayu/sf)

Masih Banyak PR Sri Mulyani Jangan Lupa Diri

Menyusul penghargaan yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia, diharapkan ia tidak lupa diri. Masih terlalu banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikannya. Salah satu PR besar Sri Mulyani adalah menghadirkan postur APBN yang kredibel.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai komentarnya lewat sambungan telepon, Selasa (13/2). Penghargaan itu diterima Sri Mulyani dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

“Menghadirkan postur APBN yang kredibel tanpa pemborosan adalah janji Sri Mulyani yang belum dilunasi,” ungkapnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, rakyat Indonesia butuh postur APBN yang bisa mengangkat martabatnya. Dan

penghargaan yang diterima Sri Mulyani hendaknya tak menjadi kebanggaan. Justru Sri Mulyani harus lihat fakta bahwa kemiskinan masih ada di kisaran 27 juta jiwa, ketimpangan bertengger di kisaran 0,39, dan daya beli masih stagnan di kisaran 4,9 persen.

“Bukankah tidak elok kita berbangga diri dengan sanjungan, penghargaan, dan pujian, disaat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih. Sri Mulyani jangan sampai merasa benar sendiri. Tak bisa diprotes karena merasa sudah menjadi

yang terbaik. Sebaliknya harus bisa menerima semua masukan dan terbuka dengan kritik,” tutur mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Pengelolaan belanja dan utang dalam APBN belum maksimal. Apalagi ke depan, skenario akan digantungkan sepenuhnya pada sektor keuangan. Belum lagi, masih kata Heri, soal defisit APBN yang belum mampu dipecahkan dan berakibat pada beban utang yang besar. Tercatat, masih ada gap antara pendapatan dan belanja negara. Rasio utang masih menunjukkan grafik naik.

Tahun 2014, sambung Heri, rasionya sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, dan tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Bahkan pada 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. “Penghargaan yang dinobatkan kepada Sri Mulyani harus menjadi cambuk untuk membebaskan lebih dari 250 juta jiwa dari beban utang,” tandas politisi dari dapil Jabar IV itu. ■(mh/sc)



Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan

Foto: Arif/br

Komisi I Apresiasi TNI Gagal Penyelundupan 1 Ton Sabu

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan TNI AL yang berhasil menangkap kapal MV Sunrise Glory yang membawa 1 ton narkoba jenis sabu di perairan Batam, beberapa waktu lalu.

disiagakan. “Jadi salah satu peran TNI, seperti ini yang kita sangat nantikan terus kedepan, sinergi dengan seluruh pihak baik imigrasi, Polri dan BNN serta yang paling penting lagi keterlibatan seluruh masyarakat,” terang Kharis.

Sebagai Ketua Komisi I DPR RI, Kharis mengaku akan mendukung penuh langkah TNI, khususnya operasi TNI di perbatasan yang juga menjadi perhatian khusus DPR.

“Terutama kaitan dengan cegah tangkal upaya perang asimetris melalui penyelundupan barang ilegal dan narkoba. Sekali lagi Bravo TNI AL,” pungkasnya. ■(am/sf)

Salah satu peran TNI, seperti ini yang kita sangat nantikan terus kedepan, sinergi dengan seluruh pihak baik imigrasi, Polri dan BNN serta yang paling penting lagi keterlibatan seluruh masyarakat

“Apresiasi yang tinggi kepada semua prajurit yang terlibat dalam patroli dan penangkapan penyelundupan narkoba jenis sabu dari kapal berbendera Singapura di perairan Batam. Ribuan nyawa putra putri bangsa bisa terselamatkan dari racun narkoba, terimakasih saya untuk prestasi TNI AL,” papar Kharis dalam keterangan persnya, Sabtu (10/2).

Menurut keterangan TNI AL, MV Sunrise Glory dicegat oleh KRI Sigurot saat memasuki wilayah perairan Indonesia. Saat dilakukan pemeriksaan, dokumen kapal terindikasi palsu. Kapal itu lalu ditarik ke Dermaga Batu Ampar, Batam.

Politisi dari F-PKS ini juga meminta agar patroli TNI AL di kawasan perbatasan lebih diintensifkan lagi dan terus



Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari

Foto: Arif/br

Minat Baca dan Literasi Indonesia Sangat Rendah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti rendahnya minat baca dan literasi di Indonesia. Padahal, budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong minat baca di masyarakat.

Berdasarkan data Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. Sementara, kajian Perpustakaan tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7.

“Taman Baca Masyarakat (TBM) sangat penting. Keberadaan TBM di tengah-tengah masyarakat menjadi upaya untuk mempermudah akses terhadap buku bagi masyarakat. Tetapi yang

kami temukan, TBM yang didirikan Kemendikbud tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Baik dari buku, rak, dan fasilitas lainnya,” kata Fikri saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/2).

Lebih lanjut politisi F-PKS ini menjelaskan, untuk meningkatkan minat baca dari bawah diperlukan penguatan TBM, karena sarana tersebut menjadi ujung tombak bagi akses masyarakat terhadap buku.

Menurut Fikri, perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga yakni Perpustakaan, Kemendikbud, Kemendesa dan Kemendagri, untuk membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat. Dengan koordinasi lintas kementerian tersebut, Fikri berharap upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dapat lebih serius tergarap dan mengangkat literasi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.

Selain sarana prasarana, Fikri menilai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang ini juga masih dibayangi masalah. Pasalnya, saat ini porsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai jabatan fungsional termasuk bagi pustakawan belum memadai sesuai



Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meninjau perpustakaan dan kearsipan Prov. NTB

dengan kebutuhan.

Dalam kunjungan tersebut terungkap, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2015 level pustakawan hanya sampai pada level madya. “Pustakawan yang sebelumnya sudah menjadi pustakawan utama, harus turun levelnya, bahkan tunjagannya pun harus dikembalikan,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB Imhal mengatakan, saat ini provinsi sedang menggalakkan lomba - lomba literasi serta promosi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

“Kami juga membantu dukungan buku ke semua desa, masjid-masjid dan beberapa sekolah. Untuk di sekolah sudah ada gerakan cinta membaca, dimana setiap kelas dibagi untuk mengunjungi perpustakaan kemudian hasil kunjungan siswa akan dijadikan bahan penilaian siswa,” jelasnya. ■ *(ann/sf)*



Photo: Ann/sf



Anggota Komisi X DPR RI, Mar Linda Irwanti

Photo: Eka/br

Pemerintah Harus Tanggung Jawab Tingkatkan Minat Baca

Data UNESCO menyebutkan, dari 1000 warga Indonesia, hanya satu orang saja yang memiliki minat untuk membaca. Anggota Komisi X DPR RI menilai, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurutnya, rendahnya minat baca masyarakat ini tak boleh dibiarkan. Melalui berbagai program, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

“Tidak sekedar memberikan tempat yang layak dan nyaman untuk bangunan perpustakaan yang dibangun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menambah koleksi bukunya. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat warga enggan ke perpustakaan karena koleksi bukunya yang kurang lengkap dan tidak update,” ungkap Mar Linda saat meninjau Perpustakaan Umum di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (7/2).

Politisi F-PG itu menambahkan, dari data UNESCO tersebut, terungkap bahwa dalam satu buku dibaca oleh lebih dari 15 ribu orang. Padahal idealnya, UNESCO menyebut hanya satu buku untuk dua orang. Hal ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Mar Linda juga menyebutkan, untuk meningkatkan minat baca juga melalui peningkatan dan pengembangan perpustakaan desa. Sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan buku bacaan lebih mudah. Pemerintah juga wajib membuka peluang komunitas-komunitas bahasa pecinta minat baca untuk ikut andil dalam kemajuan perpustakaan.

“Dewan akan mendorong Perpustakaan Nasional untuk membuat buku murah bermutu yang mudah dijangkau masyarakat,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■ *(br/sf)*

Perpustakaan Harus Jadi Pusat Pengembangan SDM

Perpustakaan sebagai sumber literasi harus dijadikan sebagai pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dari perpustakaan, sumber ilmu dan informasi didapat. Manusia unggulan pun mestinya bisa lahir dari mereka yang rajin mengakses perpustakaan untuk mengembangkan diri.

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan hal itu di Kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/2). Untuk menjadikan perpustakaan sebagai sumber pengembangan SDM, perlu dikelola oleh pustakawan profesional. “Tidak boleh lagi perpustakaan dijadikan tempat pembuangan pegawai,” kata Mujib saat memimpin pertemuan dengan Sekda Kepri dan para pustakawan Kepri.

Menurut Mujib, perpustakaan harus dijauhkan dari stigma yang memberi citra negatif di mata masyarakat. Sebaliknya, gerakan gemar literasi dan membaca bisa dimulai dari perpustakaan. Hanya

saja, sambung politisi Golkar ini, pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia belum didukung politik anggaran yang memadai. Ditambah minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Dari data UNESCO tahun 2015, peringkat literasi Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara.

Lebih ironis lagi, masih dari data UNESCO, di Indonesia satu buku dibaca 15 ribu orang per tahun. Padahal standar UNESCO, mestinya satu buku dibaca dua orang per tahun. “Ini jadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan budaya literasi dan baca. Untuk itu, harus ada the right man in the right place di



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat

Foto: Hasan/ir

setiap perpustakaan Indonesia,” tutur Mujib lagi.

Potret budaya baca dan perpustakaan Indonesia yang tidak menggembirakan itu, dibutuhkan gerakan masif untuk mengubah kesan perpustakaan menjadi lebih baik. Akses mendapatkan buku dan menuju ke lokasi perpustakaan harus dipermudah. ■ (mh/sc)

BK DPR Bahas Tugas dan Fungsi dengan Majelis Nasional Laos



Ketua Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk menerima kunjungan Majelis Nasional Laos di Gedung DPR

Foto: Hasan/ir

Sistem Moral Yang Kuat Dimulai Dari Keluarga



Komisi VIII DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang bertujuan agar setiap keluarga menjadi kokoh terhadap segala macam permasalahan. Mengingat sistem moral yang kuat mesti dimulai dari lingkungan keluarga.

“Jika perlindungan keluarga ini tidak optimal, saya kira justru akan malah menjadi kehancuran bangsa,” Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI bertemu dengan jajaran Pemprov Sumatera Utara di Medan, Sumut, Kamis (8/2).

Iqbal menambahkan, RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi hal yang penting, mengingat Indonesia memiliki bonus demografi, karena mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan.

Dalam kunjungan ini, Politisi F-PKS itu sempat terperangah, ternyata



Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi

di Provinsi Sumut ini banyak anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Namun ia juga mengapresiasi kinerja Pemprov Sumut yang membuat sistem pemberdayaan anak-anak pelaku kejahatan, dengan pelatihan-pelatihan yang menghasilkan uang ketika masih dipenjara. Sehingga saat mereka keluar, bisa berdaya di masyarakat.

“Ini menjadi contoh yang bagus, pemerintah harus hadir di setiap permasalahan masyarakat. Mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan dari akarnya, karena negara yang maju pasti memiliki sistem moral yang kuat,” pungkask politisi dapil Sumsel ini. ■ (jk/sj)

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan Majelis Nasional Laos terkait kinerja BK DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung perancangan peraturan perundang-undangan serta pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang (UU).

Dalam pertemuan tersebut, Johnson menjelaskan secara luas dan detail mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan yang secara khusus berkaitan dengan fungsi legislasi di dalam proses pembentukan UU dan pihak-pihak yang berwenang mengajukan RUU.

“Tentu kita melihat di dalam pembentukan UU kita, itu ada berbagai tahapan yakni mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian juga pengesahan lalu mengundang,” kata Johnson saat pertemuan dengan Majelis Nasional Laos di ruang rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Lebih lanjut Johnson menjelaskan, pihak-pihak yang berwenang di dalam mengajukan RUU. “Yakni diantaranya DPR sebagai pemilik kekuasaan pembentuk UU,

lalu yang kedua ada Presiden sebagai pihak yang memiliki hak dalam mengusulkan RUU, dan DPD yang juga memiliki hak dalam mengajukan RUU meskipun dalam hal terbatas karena diatur dalam konstitusi,” jelasnya.

Adapun terkait tugas dan fungsi BK DPR, Johnson mengatakan sebagai sistem pendukung yang berfungsi menyiapkan konsepsi yang dituangkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden dan pemerintah.

“Peran BK DPR itu ada didalam perencanaan, kita menyiapkan naskah akademik dan draf RUU yang sudah disiapkan dalam rangka membantu namun bukan sebagai pemilik kewenangan. Tugas kita adalah membantu Komisi, lalu Baleg

yang memutuskan,” ungkapnya.

Terakhir, Johnson berharap dalam kunjungan Majelis Nasional Laos tersebut ada suatu bentuk kerja sama yang berkelanjutan antara DPR dengan Parlemen Laos. “Manakala misalnya ada hal-hal yang bisa kita komparasi dari negara Laos mengenai suatu kebijakan yang berlaku di sana. Jadi harapannya, tentu kita bisa kembangkan tukar menukar informasi dan berdiskusi terutama dengan perancang dan peneliti tentunya juga akan dilibatkan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Panitia Pengadilan Majelis Nasional Laos Khamphaeng Vilaphan mengucapkan terima kasih atas pertemuan tersebut, khususnya di dalam penjelasan terkait UU. “Saya pikir diskusi di dalam pertemuan ini sangat bermanfaat, dan saya berharap ini bukan diskusi pertama dan terakhir dan lain waktu jika diberi kesempatan kami akan mengundang BK DPR RI untuk mempelajari sistem parlemen yang ada di Laos,” ungkapnya. ■ (tru/sc)



Anggota Komisi VI DPR, Endang Srikarti Handayani membuka acara seminar kewirausahaan di Gedung Kemenkep UKM

Foto: jksd/br

Dewan Minta Permudah Akses Pembiayaan Dana Bergulir

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani meminta agar para pelaku UMKM tidak dipersulit dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ini penting untuk pengembangan UMKM dan target serapan.

“Saya minta proses pembiayaannya jangan bertele-tele, karena pada akhirnya diberikan juga. Tapi saya mendukung tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi dengan anggaran Rp 1,2 triliun, penyerapan dana mesti maksimal,” kata politisi F-Golkar saat memberikan sambutan pada seminar bertema Pelatihan Kewirausahaan Melalui GKN bagi Organisasi Masyarakat di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Minggu (11/2).

Menurut Endang, permodalan ini sangat penting untuk keberlanjutan usaha, terutama agar koperasi dan UMKM tidak berhenti atau jalan di tempat. “Yang namanya usaha, untuk

memulai perlu modal dan bagi para pelaku usaha kalau diberikan tambahan modal akan berkembang, apalagi dengan adanya persaingan usaha global. Tanpa permodalan mereka akan kalah nantinya,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah V ini.

Acara yang diinisiasinya ini merupakan bagian dari target penyerapan anggaran Rp 1,2 triliun dana alokasi bagi pengembangan UMKM. Dengan menggelar acara seperti ini, sosialisasi pun tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. “Saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi VI DPR harus memfasilitasi agenda seperti ini untuk rakyat. Buat saya, wajib 24 jam melayani rakyat, karena ini amanah yang harus

dijalankan dan ini juga bentuk cinta kepada rakyat,” tutupnya saat wawancara dengan Parlementaria.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat Hariyanto mengatakan, para peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha akan mendapat sertifikat. Sertifikat tersebut akan dijadikan salah satu syarat pembiayaan dana bergulir. “Para pelaku usaha jika ingin mengajukan harus membuat proposal. Kemenkop menyediakan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) maksimal Rp 13 juta, sedangkan pembiayaan dana bergulir (LPDB) minimal Rp 50 juta,” ungkapnya. ■ (mh/sc)

Pemegang Jamkestama Harus Segera Periksakan Diri

Para pemegang kartu Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) diserukan agar memeriksakan diri ke setiap rumah sakit provider yang bekerja sama dengan PT. Jasindo. Pemegang Jamkestama kerap lupa memeriksakan kesehatan di tengah kesibukannya sebagai pejabat negara.

Seruan ini disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing usai meninjau RS Awal Bros di Batam, Kepri, Senin (12/2). Para pemegang kartu Jamkestama adalah pejabat negara termasuk anggota DPR RI dan keluarganya. Mayoritas anggota dewan sudah berusia lanjut, dan kesehatan pun mulai menurun. Namun, di sisi lain mereka harus bekerja ekstra ketat sebagai legislator.

Di sinilah, kata Anthon, perlu diingatkan kembali agar tetap menjaga kesehatan dan memeriksakan diri di sejumlah rumah sakit provider di seluruh Indonesia yang ditunjuk untuk memberi layanan kesehatan VVIP kepada anggota dewan. Menjadi Anggota DPR RI sekali lagi menuntut kesehatan prima. Untuk itu, rumah sakit provider juga diimbau cepat memberi layanan VVIP itu, tak perlu konfirmasi lagi ke pihak Jasindo sebagai penyedia Jamkestama.

“Yang kita minta ke depan, semua rumah sakit mempunyai daftar nama-nama peserta Jamkestama. Para pemegang Jamkestama untuk segera memeriksakan diri di tengah-tengah kesibukan bekerja sebagai anggota dewan dan ini perlu diingatkan. Untuk memberi layanan, rumah sakit jangan menunggu konfirmasi yang tidak diperlukan, karena semua namanya sudah ada dan pasti mendapat jaminan,” urai Anthon. ■(mb/sc)



Tim Kunspek BURT DPR meninjau RS Awal Bros di Kota Batam.

Baleg DPR Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pada RUU Prioritas

Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Martin Hutabarat menegaskan, DPR dalam setiap perumusan undang-undang selalu mengutamakan aspirasi masyarakat, sehingga tanpa adanya aspirasi masyarakat mustahil sebuah undang-undang akan dibuat oleh DPR.

Hal itu diungkapkan saat Sosialisasi Prolegnas Prioritas 2018 ke Sumatera Selatan. Ia pun memberikan apresiasi atas aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut. “Aspirasi masyarakat adalah kunci suksesnya pembuatan UU. Tanpa ada masukan masyarakat, mustahil UU itu ada,” ungkap Martin di Palembang, Selasa (13/2).

Politisi Gerindra ini menuturkan bahwa saat ini Baleg sedang berupaya mempercepat pembahasan revisi UU Perkelapasawitan, karena Sumatera Selatan adalah daerah dengan produksi kelapa sawit yang besar. Maka kunjungan

ini sangat penting dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat Sumsel.

“Kita dari Baleg ada usaha untuk percepat revisi UU Minerba dan revisi UU Perkelapasawitan. Itu sudah ada RUU-nya di Prolegnas. Produksi kelapa sawit di Sumsel ini besar, meski daerahnya tidak terlalu luas dibanding Kalimantan. Karenanya, dalam proses pembuatan UU Perkelapasawitan, maka harus dengar aspirasi masyarakat Sumsel,” jelas Martin.

Ia pun juga ingin menegaskan ke masyarakat bahwa RUU Perkelapasawitan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa ada tujuan tersebut, mustahil sebuah UU



Ketua Tim Kunspek Baleg DPR, Martin Hutabarat

Foto: Hendri/br

akan dirancang oleh DPR. “RUU Perkelapasawitan mulai dibahas di Baleg dan ini diusahakan untuk tujuan agar kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Hadir dalam pertemuan dengan Tim Baleg ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar serta seluruh jajaran SKPD Pemprov Sumsel.

■ (hs/sc)

Sosialisasi Prolegnas di Sulteng Dapat Respon Positif



Ketua Tim Kunker Baleg DPR RI Bachtiar Aly

Foto: Dedy/br

Sosialisasi RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Provinsi Sulawesi Tengah mendapat respon positif dari berbagai komponen masyarakat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya *stakeholder* yang ikut hadir dan aktif berinteraksi dalam pertemuan yang digelar oleh Baleg di Kantor Gubernur Sulteng.

“Kunjungan Baleg ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah mendapat respon yang sangat positif. Komunikasi yang terjalin juga sangat interaktif,” ucap Ketua Tim Kunker Baleg DPR RI Bachtiar Aly di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (13/2).

Bachtiar mengatakan dalam pertemuan tersebut, Baleg menjelaskan mengenai program-program legislasi yang telah dilakukan, yakni RUU apa saja yang sudah masuk proses harmonisasi, dan RUU mana yang masih dibahas.

“Para akademisi yang hadir dalam

pertemuan sangat kritis menanggapi. Misalnya terhadap Undang-Undang yang kurang tersosialisasikan karena terbatasnya rapat dengar pendapat, dan kita membuka diri terhadap hal tersebut,” ujarnya.

Bachtiar menegaskan, upaya sosialisasi mengenai Prolegnas itu sangatlah penting, supaya seluruh *stakeholder* mengetahui bahwa isi RUU yang dibuat tersebut tidak jauh dari aspirasi yang telah disampaikan oleh semua pihak terkait.

“Sosialisasi ini menjadi penting,

karena kita tidak akan menutup ruang bahwa hal yang seharusnya menjadi perhatian memang harus menjadi prioritas kita,” tandas politisi Fraksi Nasdem itu.

Terhadap berbagai masukan yang telah disampaikan berbagai pihak dalam pertemuan itu, Bachtiar memastikan akan membicarakannya di tingkat Pimpinan serta tenaga ahli.

“Intinya, kita tidak mau Undang-Undang ini tercipta, tetapi tidak nyambung dengan nafas dan keinginan masyarakat,” pungkasnya. ■ (dep/sj)

Perlu Solusi Bagi Wirausahawan Pemula Yang Belum Miliki KTP

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan perlunya dibuat terobosan regulasi terkait munculnya para wirausahawan pemula yang belum memiliki KTP, karena usianya relatif muda. Hal ini diperlukan untuk mengurus birokrasi perijinan para wirausahawan pemula yang saat ini cukup marak seiring berkembangnya bisnis online.

“Bagaimana wirausahawan pemula yang belum cukup umur ini akan menerbitkan ijin usaha, sementara usianya masih SMP dan SMA yang belum punya KTP,” ungkap Wahyu saat Tim Kunjungan Spesifik berdialog dengan Pemerintah Daerah dan SKPD Sumatera Selatan di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (12/2).

Politisi Demokrat ini juga berharap agar kelak RUU Kewirausahaan Nasional mampu mengakomodir berbagai regulasi yang sudah ada di tingkat daerah, untuk disederhanakan agar bisa diimplementasikan di daerah dan mendorong tumbuhnya iklim wirausaha nasional yang kreatif dan inovatif.

“Regulasi di daerah semestinya memberi ruang seluas-luasnya untuk tumbuh kembangnya para wirausahawan pemula, jangan dihambat apalagi dipersulit dengan birokrasi yang rumit,” pinta Wahyu.

Legislasi dari Sumatera Selatan ini juga berharap masukan dari kalangan pemerintah daerah, asosiasi



Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Wahyu Sanjaya

Perlu dipikirkan juga aturan perbankan yaitu adanya kewajiban BI checking bagi para usaha kecil yang perlu pinjaman

pengusaha dan juga dinas-dinas terkait mengenai definisi kewirausahaan dalam RUU ini apakah harus berjenis usaha baru atau termasuk jenis usaha yang sudah ada.

“Perlu dipikirkan juga aturan perbankan yaitu adanya kewajiban BI checking bagi para usaha kecil yang perlu pinjaman. Bagaimana agar aturan ini ke depannya tidak menghambat wirausahawan nasional dalam mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan,” imbuh Wahyu.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizali memberi masukan maraknya jual-beli online yang belum dikenakan pajak, karena tidak perlu sewa tempat (toko) sehingga ini perlu diatur karena negara butuh pajak untuk pembangunan.

Namun pihaknya sepakat bahwa UMKM butuh proteksi, agar pengusaha besar ritel (minimarket) tidak beroperasi sampai ke pelosok, sehingga pedagang kecil tersingkirkan. “Amerika saja negara liberal tapi masih mengenal adanya proteksi,” imbuhnya.

■ (gji/sc)

Pansus RUU Kewirnas Jaring Masukan dari Pelaku UMKM Sulsel

Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dalam rangka menjaring masukan dan menggali aspirasi terkait RUU tersebut. Tim dipimpin Ketua Pansus Matri Agoeng dari Fraksi PKS.

Matri mengatakan, kewirausahaan nasional merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat yang berinvestasi dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan SDM. “Kewirausahaan Nasional merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan menciptakan nilai tambah, dan menerapkan kreativitas dan inovasi terutama wirausahawan pemula,” katanya saat pertemuan dengan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat Pimpinan Gubernur Sulsel, Senin (12/2)

RUU Kewirausahaan Nasional, menurutnya, diharapkan bisa segera diwujudkan untuk menumbuhkan

wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kadiskop UKM Sulsel Malik Faisal mengapresiasi kunjungan Tim Pansus Kewirausahaan Nasional ke Sulsel. Malik menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung program kewirausahaan dan program kewirausahaan ini menjadi unggulan.

Dikatakannya, Pemprov Sulsel memiliki program penciptaan 100 wirausaha baru di setiap desa selama lima tahun, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Program wirausaha baru berbasis desa dituangkan dalam Pergub No.10 tahun 2014 tentang program diklat dan penghargaan wirausaha. “Wirausahawan

baru kami dukung dengan penyediaan sarana prasarana usaha, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi akses pasar, dukungan manajemen serta teknologi,” tambahnya.

Selain Matri Agoeng, turut serta anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional antara lain M. Rakyam Ihsan Yunus dari F-PDIP, Muh. Nur Purnamasidi dari F-PG, Fadhlullah dari F-Gerindra, dan Nyat Kadir dari F-Nasdem.

Tim pansus diterima Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Haris, Kadiskop UKM Sulsel Malik Faisal, Kepala BKPMD Sulsel AM. Yamin, Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo dan pejabat lain di lingkungan OPD Pemprov Sulsel. Hadir pula perwakilan Kadin, HIPMI, ABDSI Sulsel, PLUT Sulsel, Akumandiri Sulsel dan beberapa asosiasi UMKM serta akademisi. ■ (man/sc)



Tim Pansus RUU Kewirausahaan Nasional menjaring masukan dan menggali aspirasi terkait RUU tersebut di Sulawesi Selatan

Foto: Andri/hr



Ketua Tim Pansus Kewirnas Ichsan Firdaus (kedua dari kiri).

Foto: Inani/hr

RUU Kewirnas Dorong Lahirnya Wirausaha Baru

Potensi ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat bersaing salah satunya adalah munculnya wirausahawan (entrepreneur) baru dari berbagai bidang usaha. Selama ini, banyak wirausahawan memulai usaha dari usaha kecil dan mikro. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang RUU Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) disusun guna mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru.

“Sangat diperlukan kebijakan untuk mendorong peningkatan jumlah entrepreneur baru yang sanggup berperan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, RUU ini dirancang untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru di Indonesia,” jelas Ketua Tim Pansus Kewirnas Ichsan Firdaus dalam pertemuan dengan Sekda DI Yogyakarta Gatot Saptadi beserta jajaran, di Kantor Gubernur DIY, Selasa (13/2).

Ichsan, mengatakan, Pansus RUU Kewirnas melakukan kunjungan kerja ke DIY dalam rangka mencari masukan dan saran yang konkret dari Pemda DIY, terkait penyusunan RUU Kewirnas. Terutama tentang strategi kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan kewirausahaan nasional serta penyempurnaan terkait pokok-

pokok substansi dalam RUU Kewirnas.

Politisi F-PG itu menambahkan, kunjungan kerja ini juga untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat memunculkan wirausaha di daerah, termasuk di DIY. “Hambatan berkembangnya wirausaha itu apa perlu digali dan dicarikan solusi,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur DIY yang diwakili Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan, RUU Kewirnas adalah sebagai upaya untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru di Indonesia. Sehingga perlu adanya pembahasan yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk melahirkan sebuah regulasi yang mempercepat pertumbuhan wirausaha di Indonesia.

Ia berharap dengan regulasi tersebut, dapat meningkatkan mental

generasi muda dalam berwirausaha, dan merupakan salah satu cara untuk membangun jiwa-jiwa yang tangguh. “Karena walaupun seseorang memahami strategi wirausaha, akan tetapi bila tidak berani terjun ke dunia usaha, maka proses wirausahapun tidak akan terwujud,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Sugeng Purwanto menjelaskan, perkembangan berusaha dan kewirausahaan baru di DIY sangat pesat. “Pada tahun 2016 terdapat wirausaha baru sebanyak 16.956 wirausahawan baru,” ungkapnya.

Sugeng mengatakan, selama ini DIY memang belum memiliki Perda tentang Kewirausahaan. Namun, lanjutnya, sesuai arahan Presiden RI Jokowi melalui Perpres 91, untuk percepatan wirausaha di DIY sudah terbentuk Satgas Percepatan Berusaha/Wirausaha di tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota.

“Percepatan wirausaha di DIY ini sudah terbentuk Satgas dengan diterbitkannya SK Gubernur DIY Nomor: 25/KPTS/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha DIY,” paparnya.

Kunjungan kerja Pansus RUU Kewirnas ini juga diikuti oleh Anggota Pansus Lintas Fraksi yakni Hamka Baco Kady (F-PG), Rinto Subekti (F-PD), dan Zulfan Lindan (F-NasDem). ■(in/sj)



Tim Pansus RUU Pertembakauan mengunjungi PT Djarum Super di Jateng.

Industri Rokok di Jateng Miliki Banyak Nilai Positif

Kabupaten Kudus, dikenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Salah satu pabrik rokok skala besar di sana, PT. Djarum Super, perannya dinilai sangat berpengaruh terhadap nasib petani dan penerimaan negara.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Firman Soebagyo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan mengunjungi PT. Djarum Super di Kudus, Jawa Tengah, Kamis, (8/2). Kunjungan ini guna mencari masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan RUU Pertembakauan,

“Tentunya industri rokok sudah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang besar dan azas manfaatnya. Kalau kita lihat di PT. Djarum Super ini total karyawan mencapai 55.000 karyawan, jadi jika

dilihat dari aspek ekonomi nilai positifnya lebih banyak daripada negatifnya,” jelas Firman.

Politisi F-PG itu menambahkan, petani tembakau di Jateng tidak akan ada artinya jika tidak ada industri rokok dan begitupun sebaliknya. PT. Djarum Super bisa menampung seluruh petani karena pabrik ini menggunakan tembakau tertentu dan grade tertentu. Oleh karenanya, industri rokok juga harus membina petani.

“Hasil yang kami dapat ini akan menyempurnakan undang-undang yang akan dibahas. Mudah-mudahan nanti undang-undang ini bisa memberikan satu keputusan hukum, tidak hanya petani tapi juga industri rokok,” tambah politisi dapil

Jateng ini.

Tak hanya Jawa Tengah, Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Pertembakauan yang lain juga mengunjungi Jawa Timur untuk menyerap masukan lebih banyak dan kesemuanya akan disusun dengan seksama.

“Kunjungan kami ke pabrik rokok PT. Djarum Super guna mencari masukan-masukan dari berbagai stakeholder yang mana sebelumnya kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta dan sudah mengunjungi pabrik rokok skala kecil dan menengah di Malang,” jelas Firman. ■(as/sj)

RUU Pertembakauan Bukan RUU Rokok



Tim Pansus RUU Pertembakauan meninjau PT Gudang Garam Tbk di Surabaya, Jatim

Photo: Sinar / Jr

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Pertembakauan Bambang Haryadi menyatakan RUU Pertembakauan bukan RUU Rokok. “Saya pernah menyampaikan, ini RUU Pertembakauan bukan RUU Rokok. Karena kami DPR sering diserang bahwa kami ingin menggoalkan RUU terkait industri rokok,” kata Bambang dalam paparannya saat pertemuan Tim Pansus RUU Pertembakauan dengan Direksi PT. Gudang Garam Tbk di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/2).

Harus diakui, lanjut politisi Gerindra ini, bahwa pengguna tembakau terbesar saat ini adalah industri rokok. Namun dalam perjalanan pembahasan RUU ini, Pansus mendengar dari para ahli yang diundang Pansus Pertembakauan menyampaikan, bahwa tembakau adalah salah satu bahan baku pembuatan insulin. “Saat ini penderita diabetes sangat tinggi di Indonesia dan sampai saat ini Indonesia masih impor insulin,” ungkap Bambang.

Dalam kesempatan tersebut anggota dewan dari dapil Jawa Timur ini mengajak untuk menyadarkan masyarakat, bahwa ada sisi positif dari manfaat tembakau ini. “Jadi kita harus menyadarkan masyarakat, bahwa jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja dan kami juga tidak ingin industri rokok selalu diserang oleh gerakan-gerakan anti rokok tanpa mereka menyadari azas manfaat dan

mudaratnya. Diakui memang ada azas mudaratnya bahwa dalam regulasi RUU Pertembakauan ini,” jelasnya.

“Kami berpandangan, bahwa ada beberapa hal yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Satu sisi negara membutuhkan cukai tembakau dan di satu sisi yang lain kita juga berbicara tentang kesehatan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Bambang, satu sisi kita bicara petani yang mengeluh pada Pansus tentang sulitnya bertani tembakau. Di satu sisi juga industri yang diundang Pansus menyampaikan, bahwa apa yang mereka harapkan dari petani tembakau adalah tembakau yang seperti diharapkan.

Sementara, ungkapnya, tembakau Indonesia dalam hal ini semakin hari produksi pertaniannya semakin menurun. Banyak hal yang mengakibatkannya. “Beberapa pihak menyampaikan

kurangnya pembinaan dari pemerintah atau gencarnya isu menolak tembakau dan juga banyak hal, misalnya kalau kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa tembakau tidak hanya dimanfaatkan oleh rokok,” terangnya.

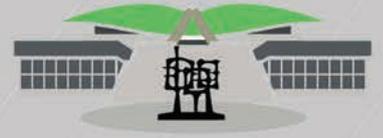
Dalam kesempatan tersebut, Direksi PT. Gudang Garam Susanto Widiatmoko menjelaskan kontribusi cukai dari PT Gudang Garam selama 10 tahun terakhir dan pembelian tembakau lokal dan impor. “Sejak 2008-2009 kondisi produksi kami tinggi, namun tahun-tahun berikutnya pertumbuhannya biasa-biasa saja. Yang perlu kami garisbawahi masuk 2017, kami mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kami sudah mengalami perjalanan cukai di industri rokok ini didalam menghadapi situasi pasar dan situasi regulasi yang ada,” paparnya.

Situasi ini, lanjutnya, sudah menjadi alarm bagi PT Gudang Garam Tbk. Oleh karena itu penting bagi perusahaannya bahwa diperlukan suatu situasi dan dukungan dari pemerintah untuk bisa melindungi industri rokok. “Seperti yang disampaikan Ketua Tim Pansus bahwa kontribusi dari cukai tembakau ini menjadi salah satu andalan bagi pemerintah yaitu 10 persen APBN kita dari cukai rokok,” jelasnya lagi.

Kemudian ia menjelaskan, bahwa pembelian tembakau lokal maupun impor tergantung pada pasokan di pasar maupun mutu dan kualitas yang tersedia di pasar.

Direksi PT Gudang Garam Tbk lainnya, Istata Taswin Siddharta menambahkan, bahwa PT Gudang Garam Tbk bukan bermaksud untuk meminta perlindungan pemerintah agar volume produksi berkembang dengan pesat.

“Karena kami menyadari rokok ini barang yang dikendalikan. Jangka panjang untuk kesehatan, volume diharapkan akan turun konsumsi perkapita kami sepenuhnya mengerti. Tapi ada baiknya kalau semua pihak yang berkepentingan juga melihat saat yang tepat untuk menurunkan volume dan strategi-strategi lain agar dari sisi ekonomi juga relatif minim,” terangnya. ■^(w)



Tiga Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Demokrat dilantik dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 – 2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/02).



Tim Kunspek Panja Perpustakaan Nasional Komisi X DPR dipimpin Marlinda Irwanti meninjau Perpustakaan Umum Kota Malang, Jawa Timur. Rabu (07/02), Foto : *eka hindra/hr*



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menyelenggarakan Pengajian Bulanan dengan tema “Istiqomah Karena Cinta” di Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (14/2). Foto: *Jaka/hr*